

ANALISIS PERFORMANSI DAN DISAIN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN DI WILAYAH PEGUNUNGAN BAWAKARAENG LOMPOBATTANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

*The Analysis of Performance and Institutional Design of Forest Management
at Bawakaraeng Lompobattang Mountain Area South Sulawesi*

Yusran dan Nurdin Abdullah

Abstract

*The objective of the research was to analyze the actual conditions, economic interactions, ecology and social problems in the area, and to formulate institutional system of forest management in Karaeng Lompo. Data collection were conducted through surveying, interviews, focus discussions and literature study. The data were then analyzed qualitatively and quantitatively following the types of data and the objectives of research. The results of the research showed that the forested area in Karaeng Lompo tended to increase the forest degradation level in the area which needs serious attention. The total forest area was 259.174 ha where the area with less vegetation was 124.884 ha (48%), **and** degraded land was 146.468,63 Ha (39,34%). Number of households found in the area was 6.677 households. Forest area of Karaeng Lompo has ecological, economical and social cultural aspects relationship so then it was recommended to change the management form of the forest into integrated forest units (KPH) model. This model was considered to have an equal level with local technical management unit at Forestry Departemen in the provincial level. The area of KPH Karaeng Lompo was managed for environmental protection purposes, water source management, non timber forest products, and limited timber production.*

Key words: bawakaraeng lompobattang mountain, forest degradation, union of forest management

PENDAHULUAN

Wilayah Pegunungan Bawakaraeng dan Lompobattang (disingkat Karaeng Lompo) mencakup tujuh wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Kabupaten Bone. Luas wilayah Karaeng Lompo seluas 1.011.693 ha, dengan kawasan hutan seluas 259.174 ha (25,62% dari luas wilayah).

Kawasan hutan di wilayah Karaeng Lompo tersebut mempunyai fungsi produksi maupun lindung yang sangat penting terhadap tujuh wilayah kabupaten/kota. Kawasan hutan berfungsi sebagai penyangga

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, dan mengendalikan erosi. Sedangkan secara sosial ekonomi, terjadi saling keterkaitan antar kabupaten dalam hal produksi, konsumsi, dan distribusi hasil hutan. Mengingat fungsi kawasan hutan yang sangat strategis tersebut, maka perlu dipertahankan dengan luasan yang cukup dan tersebar secara proporsional.

Namun akibat belum adanya sinkronisasi antar kabupaten/kota dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah Karaeng lompo tersebut, menyebabkan pemanfaatan ruang tidak saling mendukung secara ekologi, ekonomi dan sosial antara daerah hulu dengan hilir. Degradasi hutan dan lahan pada kabupaten di wilayah

hulu berdampak kepada terjadinya bencana ekologis di wilayah tersebut. Pada tahun 2004 telah terjadi bencana longsor yang sangat besar di lereng Gunung Bawakaraeng, kemudian tahun 2006 kembali terjadi bencana banjir besar di wilayah Kabupaten Sinjai dan sekitarnya yang memakan banyak korban harta dan jiwa. Bencana-bencana tersebut merupakan suatu peringatan dan pertanda bahwa kondisi hutan, tanah dan air di wilayah pegunungan Bawakaraeng dan Lompobattang sudah sangat memprihatinkan dan memerlukan penanganan serius dan segera.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka dilakukan analisis kondisi aktual kawasan hutan wilayah karaeng Lompo, analisis keterkaitan ekonomi dan ekologis antar kabupaten dalam wilayah Karaeng Lompo, serta merumuskan sistem Kelembagaan Pengurusan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang terintegrasi di Wilayah Karaeng Lompo. Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis kondisi aktual kawasan hutan wilayah karaeng Lompo
2. Menganalisis Keterkaitan ekonomi dan ekologis antar kabupaten/kota di wilayah Karaeng Lompo
3. Merumuskan sistem Kelembagaan Pengurusan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang terinterkoneksi di Wilayah Karaeng Lompo

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Desember 2006. Pengumpulan data dan informasi dilakukan pada tujuh kabupaten di wilayah Karaeng Lompo yaitu Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kabupaten Bone .

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data primer berupa data kualitatif dan kuantitatif dilakukan melalui observasi, survei, wawancara dan diskusi (FGD) dengan pihak yang terkait. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi berupa laporan, dokumen, dan data statistik kabupaten dari instansi kehutanan dan instansi terkait lainnya. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif sesuai tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Aktual Kawasan Hutan di Wilayah Karaeng Lompo

Kondisi Penutupan Lahan

Luas kawasan hutan di wilayah Karaeng Lompo adalah seluas 259.174 Ha atau 25,62 % dari total luas wilayah 7 kabupaten yang terdapat dalam wilayah Karaeng Lompo. Berdasarkan fungsinya, luas kawasan hutan di wilayah Karaeng Lompo terdiri atas hutan lindung seluas 83.961 Ha (32,39%), hutan produksi terbatas seluas 113.627 Ha (43,85%), hutan produksi seluas 48.431 (18,69%) dan hutan suaka margasatwa seluas 13.155 (5,07%).

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung dalam Wilayah Karaeng Lompo berdasarkan Peta Paduserasi Provinsi Sulawesi Selatan 2005.

| No | Kab. | Wilayah | HL | HPT | HP | HSA W | Luas Kawasan | % TLW | Kws. Ldng | Total |
|--------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------------|-------|-----------|---------|
| 1 | Gowa | 188.332 | 24.226 | 13.455 | 22.109 | 3.309 | 63.099 | 33,50 | - | 63.099 |
| 2 | Takalar | 56.651 | 86 | - | 3.482 | 4.696 | 8.264 | 14,59 | 960 | 9.224 |
| 3 | Jeneponto | 73.764 | 8.932 | 140 | 117 | - | 9.189 | 12,46 | 437 | 9.626 |
| 4 | Bantaeng | 39.583 | 2.773 | 1.262 | 2.187 | - | 6.222 | 15,72 | 589 | 6.811 |
| 5 | Bulukumba | 115.467 | 3.538 | 509 | 931 | 3.475 | 8.453 | 7,32 | 4.982 | 13.435 |
| 6 | Sinjai | 81.996 | 11.794 | 7.100 | - | - | 18.894 | 23,04 | 409 | 19.303 |
| 7 | Bone | 455.900 | 32.612 | 91.161 | 19.605 | 1.675 | 145.053 | 31,82 | 4.320 | 149.373 |
| Jumlah | | 1.011.693 | 83.961 | 113.627 | 48.431 | 13.155 | 259.174 | 25,62 | 11.697 | 270.871 |

Sumber. Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan, 2006

Kondisi kawasan hutan di wilayah Karaeng Lompo telah mengalami degradasi. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan (2006), menunjukkan bahwa kawasan hutan seluas 259.174 Ha,

yang berhutan hanya seluas 115.927 Ha (44 %), kondisi tidak berhutan seluas 124.884 Ha (48%), dan seluas 18.363 Ha (8%) wilayah tidak teridentifikasi penutupannya karena tertutup awan.

Tabel 2. Luas Penutupan Lahan Dalam Kawasan Hutan Per kabupaten dalam Wilayah Karaeng Lompo sampai tahun 2005

| No. | Kabupaten | Luas Wilayah | Luas kawasan | Kondisi Vegetasi | | Tertutup Awan | Total |
|--------|-----------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|---------|
| | | | | Berhutan | Tdk Berhutan | | |
| 1. | Gowa | 188.332 | 63.099 | 18.836 | 34.028 | 10.235 | 63.099 |
| 2. | Takalar | 56.651 | 8.264 | 124 | 8.140 | - | 8.264 |
| 3. | Jeneponto | 73.764 | 9.189 | 2.890 | 6.299 | - | 9.189 |
| 4. | Bantaeng | 39.583 | 6.222 | 1.989 | 4.214 | 19 | 6.222 |
| 5. | Bulukumba | 115.467 | 8.453 | 3.153 | 5.300 | - | 8.453 |
| 6. | Sinjai | 81.996 | 18.894 | 6.578 | 4.207 | 8.109 | 18.894 |
| 7. | Bone | 455.900 | 145.053 | 82.357 | 62.696 | - | 145.053 |
| Jumlah | | 1.011.693 | 259.174 | 115.927 | 124.884 | 18.363 | 259.174 |

Sumber. Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan, 2006

Berdasarkan hasil interpretasi citra landsat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah Sulawesi (2006), kawasan hutan di wilayah Karaeng Lompo didominasi oleh penutupan lahan berupa

pertanian lahan kering dan semak belukar yakni sebesar 61, 34 %. Padahal, kebutuhan penutupan vegetasi hutan untuk mendukung fungsi suatu wilayah DAS adalah

minimal 30% dari luas wilayah DAS dengan sebaran yang proporsional.

Kondisi penutupan lahan di wilayah Karaeng Lompo yang didominasi oleh semak belukar dan pertanian lahan kering, serta kondisi topografi yang berat tidak memungkinkan berlangsungnya fungsi hutan sebagai regulator tata air. Hal ini ditunjukkan oleh ratio debit minimum dan debit maksimum di DAS Jenneberang lima tahun terakhir sebesar 1 : 60 yang melebihi ambang batas normal yakni sebesar 1 : 25. Kecenderungan meningkatnya ratio debit minimum dan debit maksimum tersebut menyebabkan tidak normalnya supply air untuk berbagai keperluan masyarakat di wilayah Karaeng Lompo, baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Hasil analisis data sekunder menunjukkan terjadinya kecenderungan penurunan penutupan vegetasi hutan selama tahun 1986 sampai tahun 2000 sebesar 10%. Sementara itu, penutupan lahan berupa semak belukar mengalami kenaikan sebesar 7%. Perubahan penutupan lahan

tersebut telah menimbulkan permasalahan erosi dan sedimentasi yang terus meningkat.

Luas Lahan Kritis

Luas lahan kritis yang ada dikawasan Karaeng Lompoa saat ini seluas 146.468,63 Ha, yang teridri atas 101.962,30 Ha dalam kawasan hutan dan seluas 44.506,33 Ha di luar kawasan hutan. Jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan di wilayah karaeng Lompo yang seluas 259.174 Ha, maka luas lahan kritis dalam kawasan hutan Karaeng Lompo adalah 39,34%. Kondisi lahan dengan solum tanah yang dangkal dengan berbagai aktivitas pertanian yang tidak konservatif menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan lahan akibat hilangnya lapisan organik, mengakibatkan terjadinya lahan kritis. Kondisi ini tentunya memerlukan penanganan yang cepat untuk meminimalkan dampak yang akan timbul akibat perubahan kondisi lingkungan.

Tabel 3. Luas Lahan Kritis dan Jumlah Peladang Berpindah di Wilayah Karaeng Lompo

| No | Kabupaten | Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan (Ha) | Lahan Kritis luar Kawasan Hutan (Ha) | Luas Lahan Kritis |
|--------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. | Gowa | 35.449,62 | 5.054,36 | 40.503,98 |
| 2. | Takalar | 6.969,30 | 5.131,65 | 12.100,95 |
| 3. | Jeneponto | 5.480,90 | 8.623,02 | 14.103,92 |
| 4. | Bantaeng | 3.165,51 | 3.060,41 | 6.225,92 |
| 5. | Bulukumba | 2.601,23 | 486,39 | 3.087,62 |
| 6. | Sinjai | 2.591,05 | 16,40 | 2.607,45 |
| 7. | Bone | 45.704,69 | 22.134,10 | 67.838,79 |
| Jumlah | | 101.962,30 | 44.506,33 | 146.468,63 |

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006

Kegiatan rehabilitasi sebagai upaya penanganan lahan kritis melalui GNRHL sampai tahun 2005 baru terealisasi seluas 15.964 ha atau sebesar 10,90 % dari luas lahan

kritis. Hal ini menunjukkan belum seimbang laju peningkatan lahan kritis dengan upaya-upaya rehabilitasi lahan. Jika kondisi ini tidak segera ditangani akan

menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan biofisik yang akan mengakibatkan terjadinya bencana ekologis berupa banjir, tanah longsor, kekeringan dan bencana lainnya.

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Pertumbuhan populasi penduduk yang tinggi di sekitar wilayah Karaeng Lompo berdampak meningkatnya permintaan lahan untuk areal pertanian dan untuk pengembangan sektor-sektor lain

yang terkait yang membutuhkan lahan sebagai input. Struktur penduduk didominasi oleh penduduk umur produktif dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1 - 1,2 %/tahun. Sampai tahun 2005, terdapat sebanyak 6.677 KK masyarakat berladang di dalam kawasan hutan, dengan luas lahan garapan seluas 7.054 ha atau rata-rata seluas 1,05 ha/KK. Kontribusi usaha masyarakat di dalam kawasan hutan terhadap pendapatan masyarakat cukup tinggi yakni rata-rata sebesar 55,8%.

Tabel 4. Jumlah Peladang Berpindah dan Luas Lahan Garapan di Wilayah Karaeng Lompo.

| No | Kabupaten | Dalam Kawasan Hutan (Ha) | | luar Kawasan Hutan (Ha) | | Jumlah | |
|----|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | Peladang (KK) | Luas garapan (Ha) | Peladang (KK) | Luas garapan (Ha) | Peladang (KK) | Luas garapan (Ha) |
| 1. | Bulukumba | 526 | 534 | 108 | 216 | 634 | 750 |
| 2. | Bantaeng | 718 | 538 | 800 | 1.600 | 1.518 | 2.138 |
| 3. | Jeneponto | 266 | 228 | 1.358 | 5.085 | 1.624 | 5.313 |
| 4. | Takalar | 398 | 399 | 700 | 1.051 | 1.098 | 1.450 |
| 5. | Gowa | 2.089 | 2.060 | 165 | 400 | 2.254 | 2.460 |
| 6. | Sinjai | 1.257 | 1.112 | 486 | 13.400 | 1.743 | 14.512 |
| 7. | Bone | 1.423 | 2.183 | 1.110 | 2.228 | 2.533 | 4.411 |
| | Jumlah | 6.677 | 7.054 | 4727 | 23980 | 11404 | 31034 |

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006

Aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan saat ini menunjukkan fenomena yang cenderung mengarah kepada eksploitasi sumberdaya hutan, meskipun sebagian masyarakat telah menerapkan teknik agroforestry. Sistem usahatani tanaman semusim dan sistem berladang berpindah dengan rotasi yang singkat masih menjadi ancaman deforestasi saat ini. Hal ini lebih jauh akan berdampak kepada terjadinya degradasi sumberdaya alam, khususnya sumberdaya hutan. Berdasarkan hasil pengamatan pada kawasan hutan Karaeng Lompo menunjukkan

kawasan hutan yang telah diokupasi masyarakat terdiri atas : (1) kawasan hutan yang dikelola secara intensif dengan menanam tanaman semusim dan tanaman perkebunan, dan (2) kawasan hutan yang ditelantarkan setelah dikelola sebagai areal berladang berpindah.

Aktivitas masyarakat dalam kawasan hutan yang pada awalnya berbentuk spot-spot areal ladang, kemudian berkembang menjadi permukiman dan kampung. Berkembangnya permukiman di dalam kawasan hutan tersebut menjadi ancaman degradasi hutan jika tidak ditata dalam suatu system

pengelolaan yang terintegrasi dan bersinergi antara kepentingan pembangunan kehutanan dengan kepentingan pembangunan desa.

Keterkaitan Ekonomi Ekologi di Wilayah Karaeng Lompo

Wilayah kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Kabupaten Bone yang berada dalam wilayah Karaeng Lompo memiliki keterkaitan ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu pengelolaan hutan wilayah Karaeng Lompo tersebut harus terintegrasi untuk mendukung pelestarian daya dukung ekologis dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil diskusi di tujuh kabupaten disimpulkan tiga bentuk keterkaitan ekonomi-ekologi antar kabupaten di wilayah Karaeng Lompo yaitu, (1) supply-demand kayu, khususnya kayu bakar (*tumba*) untuk industri batu bata, (2) supply-demand air minum dan air irigasi, dan (3) supply-demand wisata hutan.

Hasil penelitian Dassir, dkk (2004) menemukan bahwa kebutuhan kayu bakar industri batu merah di Kabupaten Gowa sebesar 91.175,4 m³/tahun. Kebutuhan kayu bakar tersebut, 69,7% disuplai dari kawasan hutan dan kebun yang ada di Kabupaten Gowa dan 30,3 % disuplai dari Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Industri batu merah juga terdapat di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto, dengan kebutuhan kayu bakar masing-masing sebesar 87.479,1 m³/tahun dan 2.464,2 m³/tahun. Demand kayu bakar (*tumba*) pada di tiga Kabupaten tersebut adalah sebesar 181.118,7 m³/tahun.

Suplay kayu bakar untuk industri batu merah tersebut sebagian besar berasal dari dalam kawasan hutan, sehingga berpotensi sebagai faktor penyebab terjadinya

degradasi hutan. Untuk itu, di wilayah Karaeng Lompo perlu dikembangkan Hutan Tanaman Kayu Bakar untuk mensuplay kebutuhan kayu bakar industri batu merah.

Produksi air untuk rumah tangga dan air irigasi merupakan manfaat tidak langsung dari keberadaan hutan. Sebagai contoh demand air baku untuk PDAM di Kota Makassar sebanyak 108.833 pelanggan adalah 30.971.939 m³/tahun, Kabupaten Gowa sebanyak 6.059 pelanggan dengan konsumsi 1.225.076 m³/tahun. Selain itu, supai air irigasi untuk persawahan terutama di musim kemarau juga merupakan manfaat tidak langsung dari keberadaan hutan. Saat ini terjadi kesenjangan antara supply-demand, baik air rumah tangga maupun air irigasi akibat turunnya debit air DAS Jenneberang pada musim kemarau.

Wilayah pegunungan Bawakaraeng dan Lompobattang yang topografinya sebagian merupakan termasuk curam sampai sangat curam, sangat rentang terhadap gangguan berupa longsor serta penurunan fungsi pengaturan air. Perubahan komposisi jenis serta struktur tegakan yang cenderung ke arah komposisi yang rendah (monokultur) dengan struktur yang minim akan menyebabkan menurunnya fungsi ekologis hutan sebagai pencegah kerusakan lahan dan pengaturan air. Perubahan komposisi jenis dan struktur tegakan tersebut terjadi akibat konversi penggunaan lahan kawasan hutan menjadi areal budidaya pertanian dan perkebunan.

Desain Bentuk Kelembagaan Pengurusan hutan di wilayah Karaeng Lompo

Faktor-Faktor yang Berpengaruh

Meskipun lembaga kehutanan sudah ada di tujuh

Kabupaten dalam wilayah Karaeng Lompo, namun tujuan pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah tersebut belum dapat tercapai. Meningkatnya lahan kritis dan penurunan kualitas dan kuantitas hutan merupakan indikator belum optimalnya lembaga pengelola yang ada saat ini. Selain itu, pengurusan dan pengelolaan hutan yang ada saat ini kurang memberikan adanya distribusi akses, distribusi peran, dan distribusi manfaat yang adil kepada semua pihak yang berkepentingan dengan hutan.

Berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholder di tujuh kabupaten diidentifikasi 5 situasi lapangan yang merupakan permasalahan mendasar pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan di Wilayah Karaeng Lompo yaitu, degradasi hutan dan lahan, bencana ekologis banjir dan kekeringan, keterkaitan ekologi-ekonomi antar kabupaten, pengurusan dan pengelolaan hutan lintas wilayah belum berjalan efektif, dan tata ruang wilayah yang tidak terpadu antar kabupaten di wilayah Karaeng Lompo. Terdapat beberapa faktor yang terkait dengan permasalahan mendasar tersebut, namun demikian, pada dasarnya faktor-faktor tersebut dapat dikendalikan apabila terbangun kelembagaan pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan lintas kabupaten di wilayah Karaeng Lompo.

Desentralisasi kehutanan cenderung memicu pemerintah masing-masing kabupaten untuk meningkatkan kontribusi sumberdaya hutan dalam pembangunan daerahnya, dan kurang memperhatikan keterkaitan ekologi antar kabupaten dalam wilayah DAS. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya pengurusan dan pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha kehutanan. Oleh karena itu, pengurusan dan pelayanan kehutanan yang terdesentralisasi harus didukung

dengan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di desa, dan penguatan kelembagaan lintas kabupaten dalam wilayah DAS. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan pengelolaan sumberdaya hutan di desa dan antar wilayah kabupaten dapat diantisipasi dengan cepat dan tepat. Berdasarkan peraturan yang ada saat ini sistem kelembagaan yang dapat mengintegrasikan potensi sumberdaya hutan lintas kabupaten adalah Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Format Kelembagaan Pengelolaan Hutan Karaeng Lompo

Pengelolaan kawasan hutan di wilayah Karaeng Lompo akan secara efisien dan efektif jika pengelolaannya dilakukan secara terintegrasi dengan kabupaten-kabupaten di wilayah Karaeng Lompo tersebut. Upaya tersebut dapat tercapai jika didukung oleh lembaga pengelolaan yang kuat. Berdasarkan peraturan yang ada saat ini sistem kelembagaan yang dapat dibangun adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Berdasarkan hasil kajian dengan mempertimbangkan keterkaitan ekonomi-ekologi, serta pertimbangan efektifitas dan efisiensi pengelolaan, maka bentuk organisasi KPH yang di rekomendasikan adalah bentuk UPT Dinas Kehutanan Provinsi atau bentuk badan pengelola di bawah koordinasi langsung gubernur.

Bentuk organisasi UPTD merupakan unit teknis dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kawasan hutan wilayah karaeng Lompo. Sedangkan bentuk organisasi Badan atau Balai Besar merupakan lembaga Provinsi dibawah komando dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan bentuk organisasi KPH setingkat

badan atau balai, maka diharapkan lembaga pengelola akan lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya. Wilayah kelola meliputi tujuh kabupaten yaitu Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Kabupaten Bone sebagai wilayah kelola. Wilayah kelola meliputi (1) seluruh kawasan hutan di wilayah Karaeng Lompo yang mempunyai keterkaitan ekologi dengan wilayah Karaeng Lompo, (2) seluruh lahan di luar kawasan hutan yang karena kondisi fisiknya berpotensi untuk menimbulkan bencana ekologis, sehingga harus dikelola secara terintegrasi dengan pengelolaan kawasan hutan.

KPH Karaeng Lompo secara khusus diarahkan dengan tujuan utama untuk perlindungan dan pelestarian hutan, penyediaan jasa lingkungan, tata air, dan pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu. KPH sebagai institusi pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi: (1) perencanaan pengelolaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan pengelolaan, dan (4) pengendalian dan pengawasan.

KESIMPULAN

1. Kawasan hutan dan lahan di wilayah Bawakaraeng dan Lompobattang terus mengalami degradasi yang memerlukan penanganan serius dan segera. Dengan luas kawasan hutan 259.174 ha, menunjukkan kawasan yang tidak berhutan seluas 124.884 Ha (48%), luas lahan kritis seluas 146.468,63 Ha (39,34%), dan jumlah masyarakat yang berladang di dalam kawasan hutan sebanyak 6.677 kepala keluarga.
2. Kawasan hutan pada tujuh kabupaten yang berada dalam wilayah Pegunungan Bawakaraeng dan Lompobattang

ekonomi dan sosial budaya yang tidak bisa dipisahkan, dan memerlukan pengelolaan secara terintegrasi lintas wilayah administrasi kabupaten/kota.

4. Organisasi pengelola kawasan hutan wilayah Pegunungan Bawakaraeng dan Lompobattang direkomendasikan setingkat UPTD Dinas Kehutanan Provinsi atau setingkat Badan Pengelola dibawah gubernur dalam wujud Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karaeng Lompo.
5. KPH Karaeng Lompo dikelola untuk tujuan produksi jasa lingkungan, pengaturan tata air, produksi hasil hutan bukan kayu, dan produksi hasil hutan kayu secara terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2006. *Statistik Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar.
- Departemen Kehutanan. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan. Jakarta.
-2006. *Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor 18/VII-PW/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*. Jakarta
-2005. *Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Sinkronisasi Data dan Informasi Kawasan Hutan*

- antara Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Instansi Terkair Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Jakarta
-2006. Peraturan Kepala Badan Planologi kehutanan Nomor: SK.80/VII-PW/2006 tentang Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model. Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan. 2006. Data dan Informasi (Statistik). Makassar.
- 2003. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Maminasata Makassar
-2001. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2015. Makassar
- Dassir, M. Dkk. 2003. Kajian Nilai Hutan Sebagai Instrumen Kebijakan Pengelolaan Hutan Lintas Kabupaten/Kota di Era Otoda. Kerjasama BALITBANG dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Penelitian UNHAS. Makassar
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Citra Umbara. Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Fokusmedia. Bandung.

Diterima : 4 Juli 2007

Yusran

Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan,
Fakultas Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan,
Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telp./Fax. 0411-585917 Indonesia

Nurdin Abdullah

Direktur PT. Maruki International
Laboratorium Konservasi Sumber Daya Hutan,
Fakultas Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan,
Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telp./Fax. 0411-585917 Indonesia